

# **STRATEGI PENGEMBANGAN KECAMATAN MENGUNAKAN *GROWTH-SHARE* BOSTON CONSULTING GROUP (*BCG*) MATRIX (Studi Kasus di Kabupaten Sleman, DIY)**

*Algifari* \*)  
*Rudy Badrudin* \*\*)

## **ABSTRAK**

Tulisan ini menguraikan salah satu strategi yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah dalam memanfaatkan keterbatasan sumberdaya untuk memperoleh hasil pembangunan yang optimal. Strategi tersebut berkaitan dengan pengidentifikasian karakteristik lokasi (dalam hal ini kecamatan), kemudian memasukkan kecamatan tersebut ke dalam suatu kelompok tertentu. Tujuannya adalah untuk menentukan strategi pembangunan yang cocok bagi masing-masing kelompok kecamatan. Pengelompokkan kecamatan dilakukan dengan menggunakan model Growth-Share BCG Matrix. Setiap kecamatan diidentifikasi pertumbuhan ekonomi (growth) dan kontribusi PDRB kecamatan terhadap PDRB kabupaten.

Hasil identifikasi menunjukkan bahwa tidak satu pun kecamatan di Kabupaten Sleman yang memiliki pertumbuhan tinggi dan kontribusi tinggi. Kecamatan Cangkringan, Ngemplak, Pakem, Prambanan, dan Turi memiliki kontribusi yang tinggi bagi PDRB kabupaten, namun pertumbuhannya rendah. Kecamatan Depok, Gamping, Malti, Ngaglik, dan Sleman memiliki pertumbuhan ekonomi tinggi, namun kontribusi bagi PDRB kabupaten rendah. Sedangkan kecamatan Berbah, Godean, Kalasan, Minggi,

Moyudan, Seyegan, dan Tempel termasuk ke dalam kelompok yang memberikan kontribusi rendah bagi PDRB kabupaten dan juga memiliki pertumbuhan ekonomi yang rendah.

**Kata Kunci:** *GS Matrix, pertumbuhan, dan kontribusi.*

## **PENDAHULUAN**

Pemberlakuan dua undang-undang tentang Otonomi Daerah per 1 Januari 2001, yaitu Undang-Undang Nomor 22 tentang Pemerintah Daerah tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah telah memberikan peran yang lebih besar kepada pemerintah, instansi, dan para pelaku ekonomi daerah untuk menangani pembangunan di daerah. Kedua undang-undang tentang otonomi daerah tersebut muncul karena proses pembangunan di Indonesia selama ini telah mengakibatkan terjadinya kesenjangan pembangunan antarwilayah -Indonesia Barat dan Indonesia Timur. Kesenjangan tersebut terjadi karena adanya ketidakmerataan dalam alokasi investasi antarwilayah (kebijakan pemerintah pusat) yang ternyata sangat berpengaruh dalam memicu dan memacu pertumbuhan regional (Rudy Badrudin, 1992,

---

\*) Drs. Algifari, M.Si. dan \*\*) Drs. Rudy Badrudin, M.Si. adalah Dosen Tetap STIE YKPN Yogyakarta.

hal. 2). Oleh karena itu, sekaranglah waktunya untuk mem-beri peran yang lebih besar kepada pemerintah, instansi, dan para pelaku ekonomi daerah untuk menangani pembangunan di daerah.

Menurut Mubyarto (1992, hal. 13), ada beberapa isu ketidakadilan dalam pem-bangunan daerah di Indonesia, yaitu:

- a. apakah adil, wilayah yang kaya sumberdaya alam tetapi penduduknya tidak dapat menikmati kekayaan tersebut sehingga penduduknya tetap miskin.
- b. apakah adil, penduduk Jakarta seakan bergelimang uang padahal yang tersebut me-rupakan hasil pengusaha sumberdaya alam di daerah di luar Jakarta yang pendu-duknya tetap miskin.
- c. apakah adil, seandainya penduduk yang bertempat tinggal di wilayah yang kaya sum-berdaya alam tetapi hanya menikmati sendiri kekayaan tersebut tanpa membaginya de-ngan penduduk wilayah lain yang miskin.

Beberapa isu tersebut menunjukkan bahwa kata keadilan masih merupakan sesuatu yang sangat mahal di Indonesia dan isu-isu itulah yang sangat potensial sebagai sumber kemunculan disintegrasi bangsa. Pemerataan pembangunan wilayah dengan pemerataan alokasi investasi antarwilayah perlu memperhatikan masalah dan potensi yang ada di wi-layah sehingga diharapkan akan terjadi spesialisasi dalam proses pembangunan dengan keunggulan komparatif yang dimiliki masing-masing wilayah. Demikian pula dengan pe-ngembangan wilayah melalui pembangunan di daerah antara pusat pemerintahan daerah propinsi dengan kota/kabupaten dan antara daerah kota/kabupaten dengan kecamatan, dan seterusnya harus pula memperhatikan masalah dan potensi yang ada.

Otonomi Daerah yang telah diberlakukan per 1 Januari 2001 yang lalu dapat menjadi tantangan dan peluang bagi pelaku ekonomi di daerah karena adanya pelaku ekonomi di daerah yang belum dan sudah siap untuk menghadapi Otonomi Daerah tersebut. Di samping itu, tantangan muncul karena adanya kelemahan pelaku ekonomi di daerah sedangkan pe-luang muncul karena adanya kekuatan pelaku ekonomi di daerah.

Menurut Gunawan Sumodiningrat (1999, 5), untuk menyongsong Otonomi Dae-rah maka perlu penyiapan sumberdaya manusia di daerah. Sumberdaya ma-nu-sia di daerah yang antara lain aparat daerah,

perguruan tinggi, lembaga pengembang masyarakat, dan berbagai pihak yang peduli dalam pem-bangunan yang berwawasan pada pemberdayaan masyarakat sangat diha-rapkan peranannya dalam sumbangan pemikiran pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menempatkan pembangunan pada pro-porsi sebenarnya. Aparat dituntut untuk mengembangkan kepemimpinan yang merakyat yang mampu memahami aspirasi dan masalah yang dihadapi ma-sya-rakatnya. Kepemimpinan yang seperti itu merupakan syarat untuk mengem-bangkan sumberdaya manusia. Dalam kerangka makro, penyiapan sumberda-ya manusia sebagai pelaku ekonomi yang appropriate untuk Otonomi Daerah harus segera diwujudkan. Dalam kerangka mikro, penyiapan teknis aparat pe-lak-sana Otonomi Daerah diwujudkan melalui pelatihan dan pemberian kesem-patan yang luas kepada pelaku ekonomi di daerah untuk ikut bertanggung-jawab dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah.

Di samping aparat, masyarakat, sebagai pelaku ekonomi di daerah, juga perlu disertakan sejak awal dalam persiapan, pelaksanaan, dan pemeliharaan karena masyarakatlah yang akan melaksanakan, memanfaatkan, menikmati, dan memelihara sehingga program dapat berkelanjutan. Hasil dari program yang berkaitan dengan Otonomi Daerah hendaknya dapat meningkatkan ke-trampilan, mutu kehidupan, dan pendapatan masyarakat. Dengan demikian, pe-mantapan Otonomi Daerah perlu dilandasi peranserta masyarakat secara konstruktif dalam rangka mewujudkan pemerataan pembangunan beserta hasil-hasilnya.

Ketidakmerataan pembangunan di Indonesia berlangsung dan berwujud dalam berbagai bentuk, aspek, atau dimensi (Dumairy, 1996, 62). Ketidakmerataan terjadi pada kegiatan pem-bangunan, distribusi pendapatan, spasial atau antarwilayah, sektoral, dan regional. Da-lam kehi-dupan sehari-hari dapat dijumpai hal-hal seperti adanya perumahan mewah di dae-rah pedesaan atau pinggiran kota dan adanya wilayah kumuh di perkotaan. Ketidak-merataan ini bukanlah sebagai akibat semata-mata pembangunan yang dilaksanakan tetapi juga merupakan sesuatu yang memang sudah direncanakan. Hal ini terkait dengan cita-cita para perencana pembangunan di Indonesia yang menjadikan Indonesia sebagai negara in-dustri

yang oleh karenanya sektor indus-trilah yang dipilih sebagai sektor unggulan. Jadi ketidakmerataan di Indonesia lebih dise-babkan karena strategi pembangunan dalam era Pembangunan Jangka Panjang I yang lebih ber-tumpu pada aspek pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi yang disertai ketidakmerataan pembangunan nam-paknya menjadi suatu kecenderungan yang terjadi di beberapa negara sedang berkembang. Selain Indonesia, Pakistan juga mengalami hal yang sama. Hal itu terjadi ketika Presiden Ayub mulai me-megang tampuk pemerintahan pada tahun 1958 dan memutuskan untuk mencapai laju pertum-buhan ekonomi yang tinggi dan mengesampingkan pembagian pen-dapatan yang merata dan sistem organisasi ekonomi yang lebih demokratis (Mahbub ul Haq, 1983, 37-39).

Fenomena yang kontradiktif antara pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan ketidak-merataan pembangunan yang terjadi di negara sedang berkembang sejalan dengan teori yang dikemukakan Simon Kuznets dengan inverted U curve (Mudrajad Kuncoro, 1997, 105-106). Inverted U curve menyatakan bahwa pada tahap awal pembangunan akan di-tandai dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi yang disertai tingkat ketimpangan pendapatan yang tinggi pula. Kondisi tersebut akan berlangsung sampai pada titik krisis tertentu, di mana tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan diikuti oleh menurunnya tingkat ketimpangan pendapatan.

Krisis moneter berkepanjangan yang terjadi di Indonesia secara lang-sung berpe-ngaruh pada struktur perekonomian dan pertumbuhan ekonomi daerah-daerah di Indonesia, tak terkecuali Kabupaten Sleman. Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Sleman tahun 1998 atas da-sar harga konstan tahun 1993 sebesar Rp1.496,863 milyar. Kondisi tersebut mengakibatkan laju pertumbuhan ekonomi Sleman pada tahun 1998 turun sebesar 7,99%, padahal tahun sebelumnya (1997) mencapai 3,54%. Penurunan terjadi pada hampir semua sektor, kecuali sektor listrik, gas, dan air bersih (Selintas Hasil Pem-bangunan Sleman 1999-2000, hal. 31).

Berdasarkan data PAD Hasil Pembangunan Sleman 1999-2000, pada tahun 1998 memper-lihatkan bahwa kontribusi sektor tersier pada PDRB sangat

dominan, yakni 56,5% (naik 2,8%). Termasuk dalam sektor tersier adalah sektor perdagangan, hotel, dan restoran, sektor pe-ng-angkutan dan komunikasi, sektor keuangan, persewaan dan jasa per-usahaan, serta sektor jasa-ja-sa. Kontribusi sektor primer yang terdiri dari sektor pertanian dan sektor pertambangan dan penggalian hanya 18,08% pada tahun 1998 (turun 2,77%). Sedangkan kontribusi sektor sekunder yang terdiri dari sektor industri pengolahan, sektor listrik dan gas, serta air bersih dan sektor bangunan menurun 0,17%, yaitu menjadi 25,42% pada tahun 1998.

Untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi masyarakat, pemerintah daerah Kabupaten Sleman mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan, yakni kegiatan ekonomi yang berbasis pada masyarakat dan untuk pe-ning-katan kesejahteraan masyarakat. Agar usaha pengembangan tersebut dapat te-rea-lisasi diper-lu-kan dana investasi. Kabupaten Sleman berupaya menggali dana pem-bangunan secara optimal dari berbagai sumber, baik dari sektor pemerintah maupun dari sektor non pemerintah. Pengembangan kegiatan investasi di Kabupaten Sleman dika-tegorikan dalam investasi fasilitas dan investasi non fasilitas. Kegiatan investasi selama ta-hun 2002 dapat dilihat pada Tabel 1.

**Tabel 1**  
**Investasi di Kabupaten Sleman Tahun 2002**

Jenis investasi	Nilai investasi
1. Investasi Fasilitas	.
PMA	US\$146.000
PMDN	Rp43.415.000.000
2. Investasi Non - Fasilitas	Rp47.132.127.000

Sumber: BKPM Kabupaten Sleman.

Investasi yang dilakukan di berbagai wilayah kabupaten Sleman dimaksudkan untuk menyeimbangkan potensi-potensi yang terdapat di masing-masing kecamatan. Tulisan ini bertujuan menganalisis strategi mengembangkan wilayah kecamatan berdasarkan posisi masing-masing kecamatan dalam matriks Boston Consulting Group (BCG).

### **ASPEK TEORITIS PEMBANGUNAN WILAYAH**

Dalam pandangan ekonomi regional, pembangunan suatu lingkup wilayah tanpa mengkaitkan dengan pembangunan wilayah lain adalah tidak mungkin terjadi, demikian pula sebaliknya. Pembangunan regional dalam perencanaan-annya menggunakan konsep region (wilayah). Cara yang paling banyak di-kenal dalam mendefinisikan suatu region adalah (Syafrizal, 1983, hal. 167):

- a. Wilayah yang homogen (analisis yang bersifat makro), yaitu sebuah daerah yang memiliki sifat-sifat yang sama, yaitu perbedaan-perbedaan yang terdapat di dalam sebuah region dipandang tidak penting. Misalnya, region peng-hasil padi, region (daerah) aliran sungai, region (lahan) kritis, dan sebagainya.
- b. Wilayah yang memusat (analisis yang bersifat makro) disebut juga dengan nodal, polirized region atau functional region, yaitu sebuah wilayah yang didasari oleh adanya aliran barang secara internal, kontak, dan saling ter-gantungnya daerah-daerah tertentu dengan suatu pusat kegiatan yang dominan (biasanya sebuah kota besar/pelabuhan).
- c. Wilayah perencanaan (planning region) atau wilayah administratif (administrative region), yaitu wilayah yang keseragamannya didasari oleh kesamaan daerah administratif atau politis. Karena ketersediaan sarana admi-nistratifnya maka wilayah ini juga digunakan sebagai wilayah peren-canaan pembangunan.

Menurut Lincolin Arsyad (1999, hal. 298), dalam praktik jika kita membahas perencanaan pembangunan ekonomi daerah maka pengertian tentang region yang ketiga lah yang lebih banyak digunakan, karena:

- a. Dalam melaksanakan kebijakan dan rencana pembangunan daerah diperlukan tindakan-tindakan dari berbagai lembaga pemerintah. Oleh karena itu, akan lebih praktis jika suatu negara dipecah menjadi beberapa daerah ekonomi berdasarkan satuan administratif yang ada, misalnya propinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan seterusnya.
- b. Daerah yang batasannya ditentukan secara administratif lebih mudah dianalisis, karena biasanya pengumpulan data di berbagai daerah dalam suatu

negara, pembagiannya didasarkan pada satuan administratif.

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses yang ditunjukkan dengan tindakan pemerintah dan masyarakat dalam mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara peme-rintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan eko-nomi) dalam wilayah tersebut. Masalah pokok dalam pembangunan ekonomi daerah adalah terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pem-bangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan (endogenous development) dengan menggunakan potensi sumberdaya manu-sia, kelembagaan, dan sumberdaya fisik secara lokal. Orientasi ini mengarahkan kita kepada pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang peningkatan kegiatan ekonomi.

Setiap usaha pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Dalam usaha untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah beserta masyarakatnya harus secara bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah beserta masyarakatnya dan dengan menggunakan sumberdaya-sumberdaya yang ada di daerah tersebut harus mampu menaksir potensi sumberdaya-sumberdaya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah.

Saat ini tidak ada suatu teori yang mampu untuk menjelaskan pembangunan ekonomi daerah secara komprehensif (Lincolin Arsyad, 1999, hal. 299). Namun demikian, ada beberapa teori yang secara parsial yang dapat membantu kita untuk memahami arti penting pembangunan ekonomi daerah. Pada hakekatnya, inisi teori-teori tersebut berkisar pada dua hal, yaitu pembahasan yang berkisar tentang metode dalam menganalisis perekonomian suatu daerah dan teori-teori yang membahas tentang faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi suatu daerah tertentu.

**PARADIGMA BARU TEORI PEMBANGUNAN EKONOMIDAERAH**

Teori-teori pembangunan yang sudah ada belum mampu untuk menjelaskan kegiatan-kegiatan pembangunan ekonomi daerah secara tuntas dan komprehensif. Oleh karena itu, suatu pendekatan alternatif terhadap teori pembangunan daerah telah

dirumuskan untuk kepentingan perencanaan pembangunan ekonomi daerah. Pendekatan ini merupakan sistesa dan perumusan kembali konsep-konsep yang telah ada. Pendekatan ini memberikan dasar bagi kerangka pikir dan rencana tindakan yang akan diambil dalam konteks pembangunan ekonomi daerah. Paradigma baru ditunjukkan pada tabel 1 berikut ini:

**Tabel 1**  
**Paradigma Baru Teori Pembangunan Ekonomi Daerah**

Komponen	Konsep Lama	Konsep Baru
Kesempatan Kerja	Semakin banyak perusahaan = semakin banyak peluang kerja	Perusahaan harus mengembangkan pekerjaan yang sesuai dengan kondisi penduduk daerah
Basis Pembangunan	Pengembangan sektor ekonomi	Pengembangan lembaga-lembaga ekonomi baru
Aset-Aset Lokasi	Keunggulan komparatif didasarkan pada aset fisik	Keunggulan kompetitif didasarkan pada kualitas lingkungan
Sumberdaya Pengetahuan	Ketersediaan angkatan kerja	Pengetahuan sebagai pembangkit ekonomi

Sumber: Lincolin Arsyad, *Ekonomi Pembangunan*, Ed. 4, BP STIE YKPN., Yogyakarta ta, 1999, hal. 302.

Dasar pemikiran pewilayahan (regionalisasi) sebenarnya merupakan sesuatu yang nyata, yaitu setiap kegiatan itu pasti terjadi dan mempunyai efek dalam sebuah ruang dan bukan dalam sebuah titik yang statis (Budiono Sri Handoko, 1984, hal. 1). Misalnya, sebidang lahan yang diusahakan untuk sawah, maka kegiatan produksi padi itu tidak terbatas pada lahan itu saja, tetapi ber-dasarkan pemikiran bahwa tata ruang (spasial) kegiatan produksi padi itu berkaitan dengan letak tempat tinggal petani, berapa jauh si petani harus berjalan menuju sawahnya, asal tempat petani mendapatkan input yang di-perlukan, sasaran tempat petani menjual hasil produksinya, sasaran tempat petani akan membelanjakan pendapatannya, dan sebagainya.

Dengan demikian, dalam pendekatan tata ruang, pembangunan yang terjadi di suatu daerah akan

mempengaruhi daerah lain, demikian pula sebaliknya. Dalam perkembangan regional selanjutnya, pendekatan tata ruang ini digunakan untuk membahas hubungan antara pertumbuhan daerah perkotaan dengan pedesaan. Hubungan atau kontak yang terjadi antara daerah perkotaan dengan pedesaan beserta hasil hubungannya yang berujud tertentu diartikan sebagai interaksi. (R. Bintarto., 1996, hal. 61). Interaksi antara desa-kota merupakan suatu proses sosial, proses ekonomi, proses budaya, maupun proses politik yang terjadi karena berbagai faktor atau unsur yang dalam kota, dalam desa, dan di antara desa dan kota, seperti adanya kebutuhan (hubungan) timbal-balik antara desa-kota.

Secara garis besar hubungan timbal-balik antara desa-kota ditunjukkan dalam tabel 2 berikut ini:

**Tabel 2**  
**Hubungan Timbal-Balik antara Desa-Kota**

<b>Desa</b>	<b>Kota</b>
Produksi pangan	Pasar bagi hasil produksi pa-ngan
Konsumen input	Produsen input untuk industri pa-ngan
Sumber tenaga kerja	Pusat layanan kota (sekolah, ru-mah sakit, bank dan sebagai-nya)
Pasar untuk hasil industri	Sumber penemuan teknologi
Sumber investasi dalam artian te-o-ritik	Pusat kegiatan industri

Sumber: Budiono Sri Handoko, Interaksi antara Desa dan Kota, PPE FE UGM, dan Biro Perencanaan Deptan. RI, 1985, hal. 1.

Berdasarkan Tabel 2 dapat diinterpretasikan berbagai macam hubungan antara kegiatan-kegiatan yang berada di desa dan kota, di antaranya ada yang menyamakan hu-bungan antara desa dan kota dengan hubungan antara pertanian dan industri. Hubungan tim-bal balik itulah yang mengakibatkan munculnya fungsi kota, yaitu antara lain sebagai tempat pengumpulan hasil pro-duksi dari daerah-daerah di belakangnya atau desa-desa di sekitarnya (hinterland), sebagai tempat pengumpulan input yang diperlukan pedesaan (pupuk, bibit, obat-obatan dan sebagainya) dan se-buah pusat administrastif (Kadariah, 1989, hal. 67).

Kota tidak dapat tumbuh untuk “dirinya” sendiri, tetapi juga tumbuh untuk desa-desa di seki-tarnya. Dalam pandangan ekonomi regional, pembangunan perkotaan tanpa meng-kaitkan dengan pembangunan pedesaan adalah tidak mungkin terjadi, demikian pula se-baliknya.

**BCG MATRIX UNTUK STRATEGI PENGEM - BANGANKECAMATAN DI KABUPATEN SLEMAN**

Kecamatan-kecamatan di kabupaten memiliki karakteristik berbeda satu sama lain. Perbedaan karakteristik ini disebabkan perbedaan sumberdaya yang dimiliki, baik sumberdaya alam, sumberdaya manusia, ataupun sumberdaya modal. Sumberdaya yang dimiliki oleh suatu kecamatan menentukan

kegiatan sektor mana yang harus difokuskan untuk dikembangkan.

Pemilihan kecamatan yang harus dikembangkan didasarkan pada keunggulan yang dimiliki oleh kecamatan tersebut. Keunggulan dapat diperoleh dari sumberdaya spesifik yang dimiliki. Jika suatu kecamatan memiliki sumberdaya yang spesifik dan tidak dimiliki oleh kecamatan lain, baik jenis, mutu, maupun jumlahnya menunjukkan bahwa kecamatan tersebut memiliki keunggulan memproduksi sektor yang menggunakan input utama sumberdaya tersebut. Misalnya suatu kecamatan memiliki banyak sumber air, maka kecamatan tersebut memiliki keunggulan pada produk-produk di subsektor perikanan.

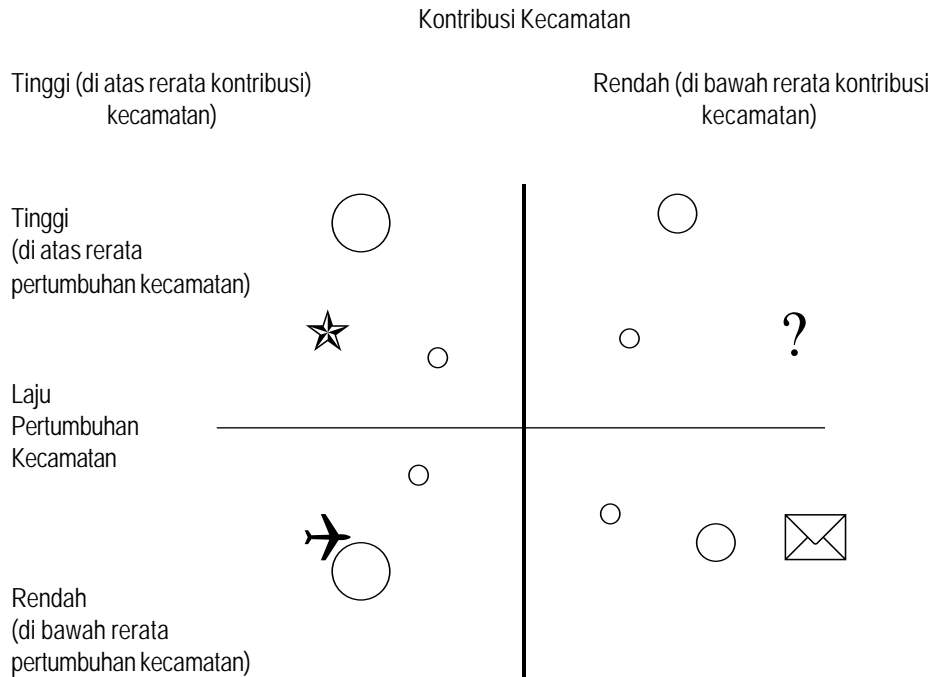
Pemilihan terhadap sektor yang memiliki keunggulan untuk dikembangkan oleh kecamatan, berarti kecamatan tersebut melakukan spesialisasi. Spesialisasi dalam kegiatan sektor sangat penting, mengingat sumberdaya yang dimiliki oleh kecamatan sangat terbatas. Dengan melakukan spesialisasi diharapkan penggunaan sumberdaya yang dimiliki kecamatan tidak mubajir.

Salah satu cara untuk mengetahui suatu kecamatan memiliki keunggulan di antara kecamatan-kecamatan yang lain adalah dengan menggunakan matriks pertumbuhan-pangsa pasar (growth-share matrix – GS Matrix). GS Matrix memiliki empat kuadran yang dipisahkan oleh dua sumbu, yaitu sumbu vertikal dan sumbu horisontal. Sumbu vertikal menunjukkan kontribusi PDRB kecamatan terhadap PDRB kabupaten

dan sumbu horisontal menunjukkan laju pertumbuhan kecamatan. Kontribusi suatu kecamatan diukur dari kontribusi persentase nilai PDRB kecamatan tersebut terhadap nilai PDRB kabupaten. Sedangkan laju

pertumbuhan kecamatan diukur dari persentase perubahan nilai PDRB kecamatan tersebut dari tahun ke tahun.

**Matrix BCG**



Lingkaran-lingkaran pada GS Matrix menunjukkan kontribusi dan laju pertumbuhan PDRB kecamatan. Masing-masing kecamatan dikelompokkan berdasarkan tinggi rendahnya kontribusi dan pertumbuhan ekonomi masing-masing kecamatan. Kecamatan yang memiliki kontribusi di atas kontribusi rata-rata dikelompokkan ke dalam kecamatan yang memiliki kontribusi tinggi, dan sebaliknya. Demikian juga halnya dengan pengelompokkan kecamatan berdasarkan pertumbuhan ekonomi. Kecamatan yang memiliki pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata pertumbuhan semua kecamatan ke dalam kelompok kecamatan yang memiliki pertumbuhan tinggi, dan sebaliknya.

Pada matriks BCG, kecamatan yang terletak pada kuadran satu (bergambar ?) menunjukkan bahwa kecamatan tersebut mempunyai share rendah, tetapi

laju pertumbuhan sektor tinggi. Kecamatan yang terletak pada kuadran satu ini memiliki peluang pasar yang besar. Hal ini ditunjukkan oleh pertumbuhan yang tinggi di kecamatan ini. Dengan demikian, kecamatan yang terletak pada kuadran satu ini berpotensi untuk dikembangkan. Strategi pengembangan kecamatan ini adalah dengan menambah modal untuk meningkatkan jumlah produk (PDRB) yang dihasilkan oleh kecamatan tersebut.

Kecamatan yang terletak pada kuadran dua (bergambar ó) menunjukkan bahwa Kecamatan tersebut memiliki laju pertumbuhan tinggi dan kontribusi tinggi. Dengan demikian, kecamatan tersebut merupakan kecamatan yang memiliki potensi berkembang, karena kecamatan tersebut berada pada pasar yang memiliki laju pertumbuhan tinggi. Selain itu, kecamatan itu juga memberikan kontribusi tinggi, karena kecamatan

tersebut memiliki kontribusi yang tinggi. Strategi pengembangan kecamatan yang berada pada kuadran dua adalah memperbesar permodalan untuk melayani permintaan dari laju pertumbuhan pasar yang tinggi dan berusaha mempertahankan kontribusi yang telah dimiliki.

Kecamatan yang terletak pada kuadran tiga (bergambar Q) merupakan kecamatan yang berhasil, karena kecamatan tersebut memiliki kontribusi yang tinggi, walaupun laju pertumbuhan sektor relatif rendah. Kecamatan yang terletak pada kuadran tiga tidak memerlukan investasi besar. Hal ini disebabkan laju pertumbuhan pasar juga relatif rendah. Jika diinginkan memperbesar investasi di kecamatan tersebut, pemerintah harus berusaha menciptakan pasar atau mencari pasar baru bagi produk-produk di kecamatan tersebut.

Kecamatan yang terletak pada kuadran empat (bergambar \*) dapat diartikan bahwa kecamatan tersebut memiliki potensi yang rendah, karena kecamatan tersebut memiliki pertumbuhan pasar rendah dan memberikan kontribusi yang rendah pula. Kecamatan tersebut memiliki tingkat keunggulan yang relatif rendah di dalam PDRBnya, sehingga kecamatan tersebut hanya mampu menyerap sebagian kecil permintaan pasar. Investasi pada kecamatan tersebut tidak dapat memberikan prospek yang baik, karena laju pertumbuhan kecamatan tersebut juga rendah. Strategi pengembangan kecamatan yang berada pada kuadran empat adalah dengan melakukan diversifikasi produk untuk menciptakan pasar baru atau mencari pasar di luar pasar yang sudah ada. Tabel 3 berikut ini menunjukkan kontribusi (share) dan pertumbuhan ekonomi kecamatan di Kabupaten Sleman tahun 2002.

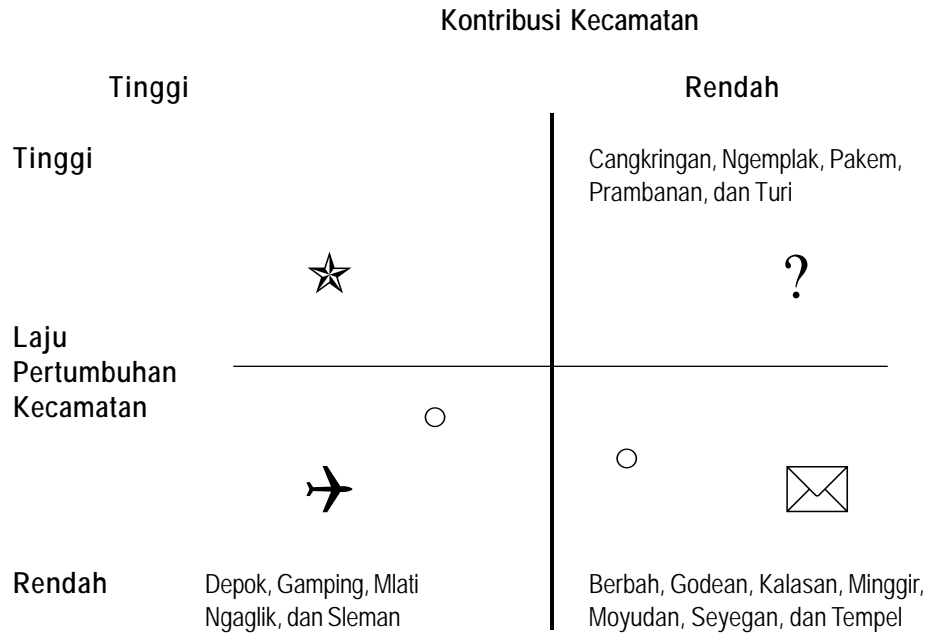
**Tabel 3**  
**Pertumbuhan dan kontribusi Kecamatan Di Kabupaten Sleman Tahun 2002**

No.	Kecamatan	Share		Laju Pertumbuhan	
1	Berbah	3.17%	rendah	2.32%	rendah
2	Cangkringan	2.80%	rendah	5.87%	tinggi
3	Depok	20.74%	tinggi	2.87%	rendah
4	Gamping	6.56%	tinggi	2.75%	rendah
5	Godean	5.25%	rendah	3.38%	rendah
6	Kalasan	4.69%	rendah	3.33%	rendah
7	Minggir	2.61%	rendah	3.07%	rendah
8	Mlati	7.42%	tinggi	3.06%	rendah
9	Moyudan	3.36%	rendah	2.95%	rendah
10	Ngaglik	8.32%	tinggi	3.35%	rendah
11	Ngemplak	4.77%	rendah	4.67%	tinggi
12	Pakem	3.11%	rendah	3.78%	tinggi
13	Prambanan	4.91%	rendah	3.76%	tinggi
14	Seyegan	2.90%	rendah	2.10%	rendah
15	Sleman	11.56%	tinggi	2.90%	rendah
16	Tempel	4.10%	rendah	2.40%	rendah
17	Turi	3.73%	rendah	5.02%	tinggi
	PDRB	5.88%		3.39%	

Berdasarkan Tabel 3, kecamatan-kecamatan di kabupaten Sleman dapat diletakkan ke dalam matriks BCG sebagai berikut:



**Matrix BCG Kecamatan di Kabupaten Sleman**



Berdasarkan matriks tersebut ternyata tidak satu pun terdapat kecamatan yang memiliki pertumbuhan tinggi dan kontribusi tinggi. Kecamatan Cangkringan, Ngemplak, Pakem, Prambanan, dan Turi memiliki kontribusi yang tinggi bagi PDRB kabupaten, namun pertumbuhan ekonominya rendah. Kecamatan Depok, Gamping, Mlati, Ngaglik, dan Sleman memiliki pertumbuhan ekonomi tinggi, namun kontribusi bagi PDRB kabupaten rendah. Sedangkan kecamatan Berbah, Godean, Kalasan, Minggir, Moyudan, Seyegan, dan Tempel termasuk ke dalam kelompok yang memberikan kontribusi rendah bagi PDRB kabupaten dan juga memiliki pertumbuhan ekonomi yang rendah.

**SIMPULAN**

Setiap pemerintah daerah perlu informasi tentang karakteristik daerahnya sebelum menentukan strategi pembangunan apa yang cocok bagi daerahnya. Hasil identifikasi terhadap karakteristik daerah kecamatan-kecamatan di kabupaten Sleman dengan menggunakan

Matriks BCG diperoleh beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Kabupaten Sleman saat ini tidak terdapat kecamatan yang memberikan kontribusi tinggi bagi PDRB kabupaten dan memiliki pertumbuhan ekonomi tinggi. Oleh karena itu perekonomian kabupaten Sleman secara keseluruhan masih memungkinkan untuk berkembang di masa mendatang.
2. Kecamatan Cangkringan, Ngemplak, Pakem, Prambanan, dan Turi memiliki kontribusi yang tinggi bagi PDRB kabupaten, namun pertumbuhan ekonominya rendah. Kecamatan yang memiliki karakteristik ini berpotensi untuk dikembangkan. Strategi pengembangan kecamatan ini adalah dengan menambah modal untuk meningkatkan jumlah produk (PDRB) yang dihasilkan oleh kecamatan tersebut.
3. Kecamatan Depok, Gamping, Mlati, Ngaglik, dan Sleman memiliki pertumbuhan ekonomi tinggi, namun kontribusi bagi PDRB kabupaten rendah. Kecamatan yang memiliki karakteristik ini tidak

memerlukan investasi besar. Hal ini disebabkan laju pertumbuhan pasar juga relatif rendah. Jika diinginkan memperbesar investasi di kecamatan tersebut, pemerintah harus berusaha menciptakan pasar atau mencari pasar baru bagi produk-produk di kecamatan tersebut.

4. Kecamatan Berbah, Godean, Kalasan, Minggu, Moyudan, Seyegan, dan Tempel termasuk ke dalam kelompok yang memberikan kontribusi rendah bagi PDRB kabiupaten dan juga memiliki pertumbuhan ekonomi yang rendah. Kecamatan yang memiliki

karakteristik ini tingkat keunggulannya relatif rendah di dalam PDRBnya, sehingga kecamatan tersebut hanya mampu menyerap sebagian kecil permintaan pasar. Investasi pada kecamatan tersebut tidak dapat memberikan prospek yang baik, karena laju pertumbuhan kecamatan tersebut juga rendah. Strategi pengembangan kecamatan yang berada pada kuadran empat adalah dengan melakukan diversifikasi produk untuk menciptakan pasar baru atau mencari pasar di luar pasar yang sudah ada.

#### DAFTAR PUSTAKA

Alonso W. Ketidakseimbangan Kota dan Daerah. EKI. Vol. XXVII. No. 3. Jakarta. September 1989.

Bisnis Indonesia. 1 Desember 1999.

\_\_\_\_\_. 22 Desember 1999.

BKPMD Kabupaten Sleman. Investasi di Kabupaten Sleman Tahun 2002.

BPS Kabupaten Sleman. Kabupaten Sleman Dalam Angka Tahun 2001. 2002.

\_\_\_\_\_. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sleman Berbagai Tahun.

\_\_\_\_\_. Produk Domestik Regional Bruto Kecamatan se Kabupaten Sleman Tahun 2001.

BPS Propinsi DIY. DIY Dalam Angka Berbagai Tahun.

Budiono. Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No. 4: Teori Pertumbuhan Ekonomi. BPFE. Yogyakarta. 1992.

Budiono Sri Handoko. Pembangunan Regional. PPE FE UGM dan Deptan RI. Yogyakarta. 1984.

\_\_\_\_\_. Interaksi antara Desa dan Kota. PPE FE UGM dan Deptan RI. Yogyakarta. 1985.

Dumairy. Perekonomian Indonesia. Penerbit Erlangga. Jakarta. 1996.

Gunawan Sumodiningrat. Agenda Pemantapan Otonomi Daerah: Suatu Pokok Pikiran. Seminar Nasional Otonomi Daerah. ISEI Yogyakarta. 1999.

Humas Pemerintah Kabupaten Sleman. Selintas Hasil Pembangunan 1999-2000. <http://www.sleman.go.id>.

J. Sardi. Peranan Kota Kecil dalam Pengembangan Pedesaan. EKI. Vol. XXXI. No.2. Jakarta. Juni 1993.

Kadariah. Ekonomi Perencanaan. LP FE UI. Jakarta. 1989.

Kompas. 16 Desember 1999.

\_\_\_\_\_. 7 Desember 2000.

\_\_\_\_\_. 7 Januari 2001.

\_\_\_\_\_. 16 Maret 2001.

\_\_\_\_\_. 26 Nopember 2001.

\_\_\_\_\_. 15 Desember 2001.

Lincoln Arsyad. Pengantar Perencanaan dan Pembangunan: Ekonomi Daerah. BPFE. Yogyakarta. 1999.

Mahbub ul Haq. Tirai Kemiskinan: Tantangan-tantangan Untuk Dunia Ketiga. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta. 1983.

Mubyarto. Pembangunan Dengan Pemerataan. Pusat Penelitian Pembangunan Pedesaan dan Kawasan UGM. Yogyakarta. 1992.

Mudrajad Kuncoro. Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah, dan Kebijakan. UPP AMPYKPN. Yogyakarta. 1997.

Paul Sitohang. Dasar-dasar Ilmu Regional. LPFE-UI. Jakarta. 1991.

Pemerintah Kabupaten Sleman. Ringkasan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman Triwulan I Tahun Anggaran 2002. 2002.

\_\_\_\_\_. Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 1997/1998 – 2001.

Rudy Badrudin. "Pengembangan Wilayah Propinsi DIY (Pendekatan Teoritis)". Jurnal Ekonomi Pembangunan FE UII. Yogyakarta. 2000.

Saving, Jason L. "Privatization and The Tarnsaction to a Market Economy." Economic Review (Federal Reserve

Bank of Dallas) Journal. Fourth Quarter 1998. p: 17-25.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Otonomi Daerah 1999. Penerbit Kuraiko Pratama. Bandung. 1999.

\_\_\_\_\_. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah dan Beberapa Peraturan Pemerintah Bidang Dana Perimbangan Nomor 104, 105, 106, dan 107. Penerbit PT Mutiara Sumber Widya. Jakarta. 2001.

Soeharsono Sagir. Ekonomi Indonesia: Gagasan, Pemikiran, dan Polemik. Penerbit Iqra. Bandung. 1981.

Subagyo. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Ed. 2. BP STIE YKPN Yogyakarta. Yogyakarta. 2002.

Sukanto R. dan AR Karseno. Ekonomi Perkotaan. Ed. 3. BPFE. Yogyakarta. 1997.

Suwarjoko Warpani. Analisis Kota dan Daerah. Penerbit ITB. Bandung. 1994.

Syafrizal. Ekonomi Regional: Suatu Perkembangan Dalam Ilmu Ekonomi. EKI. Vol. XXXI. No. 2. Jakarta. Juni 1993.